KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU desa: Senayan janji akan cari solusi terbaik
Tanggal : Senin, 23 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Revisi UU Desa

Senayan Janji Akan Cari Solusi Terbaik

SENAYAN menilai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus melibatkan eksekutif atau Pemerintah. Namun, DPR tetap membuka ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, tuntutan yang telah disampaikan para kepala desa (Kades) akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. DPR akan terlebih dahulu melihat hal-hal untuk bisa dikaji dan dibahas lebih lanjut.

"DPR akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dulu dengan Pemerintah untuk mencari jalan tengah atau jalan keluar agar apa yang menjadi aspirasi dari para kades ini bisa mendapatkan solusi," ujar Puan dalam keterangannya, kemarin.

Puan menjelaskan, setiap produk kebijakan yang lahir di DPR akan melewati kajian berdasar prinsip kehati-hatian, termasuk tindak lanjut tuntutan para kades. Prinsip ini vital agar implementasi tetap berorientasi ke kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia.

DPR, lanjut Puan, harus mengkaji terlebih dulu efektivitas dari revisi undang-undang tersebut dan tidak boleh terburu-buru. Artinya, harus dilihat secara substansi yang mendasar dari aspirasi kades-kades itu. "Tapi, yang terpenting aspirasi sudah diterima," tandasnya.

Puan menegaskan, pihaknya sudah mendengarkan apa yang menjadi keinginan para kades yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, beberapa waktu lalu. Termasuk, mendengarkan pandangan mereka soal apa manfaat yang akan diterima rakyat di bawah dan masyarakat yang ada di lapangan. "Jadi, itu yang akan kita cerna dan dibahas dulu serta tentu saja dikaji secara mendalam," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur desa. Pasalnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi problem terbesar di pemerintahan desa saat ini, di luar wacana perpanjangan masa jabatan kades yang kini sedang bergulir.

"Kita harus serius menata sistem yang kokoh untuk membangun kualitas manusia di desa. Sayangnya, Pemerintah Pusat tidak cukup serius tentang soal ini," kritik Yanuar dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Yanuar, kucuran dana desa sudah besar melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Namun, hal ini tidak diimbangi dengan program sistematis dan fokus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun kualitas aparatur desa.

Akibatnya, lanjut dia, dana desa secara umum belum mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena cara pandang kades maupun perangkat desa lebih tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik.

"Ketika Pemerintah pusat mendorong ke arah pemberdayaan ekonomi, wirausaha, dan bisnis lokal, aparatur desa masih kebingungan bagaimana cara untuk memulai dan melangkahnya," jelasnya. ■ TIF